

## **PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI SARANA PEMBINAAN NASIONALISME PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL**

**SAWALUDIN**

Dosen PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram

[sawaludin93@gmail.com](mailto:sawaludin93@gmail.com)

**Abstrak,** Salah satu rendahnya rasa nasionalisme disebabkan karena masyarakat lebih memilih untuk kelangsungan hidupnya sendiri dari pada memikirkan untuk kepentingan bangsa. Fenomena nasionalisme yang ada di masyarakat kita cukup aktual karena di setiap daerah terjadi kekerasan, kerusakan dan pengeboman yang menimbulkan korban yang tidak bersalah. Untuk itu, nasionalisme penting bagi bangsa Indonesia untuk bisa menjadi bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang aman dan damai, adil dan sejahtera. Indonesia dianggap sebagai negara pluralisme karena masyarakat bangsa Indonesia mempunyai berbagai adat istiadat, bahasa, agama, budaya dan etnik yang berbeda-beda yang tersebar dari sabang sampai merauke yang perlu dibina dan bimbing dalam pendidikan. Pengembangan rasa nasionalisme dalam masyarakat multikultural harus dibangun dari idealisme yang melekat dalam diri seseorang, maka selama seseorang itu tidak memiliki idealisme sebagai bangsa yang bersatu dalam realitas khinekaannya, maka kesadaran akan nasionalisme itu masih perlu terus dibentuk dan dikembangkan dalam diri setiap individu.

**Kata Kunci:** Pendidikan Kewarganegaraan, Sarana Pembinaan Nasionalisme, Masyarakat Multikultural

### **PENDAHULUAN**

Berbagai masalah yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia mulai dari masalah kemiskinan, pengangguran, terorisme dan lain sebagainya. Menimbulkan suatu ataupun banyak permasalahan. Salah satunya adalah rendahnya rasa Nasionalisme Bangsa Indonesia. Memang itu tidak bisa dipungkiri, karena masyarakat lebih memilih untuk kelangsungan hidupnya dari pada memikirkan hal-hal seperti itu yang dianggapnya tidak penting. Padahal rasa nasionalisme itu sangat penting sekali bagi bangsa Indonesia untuk bisa menjadi bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang aman dan damai, adil dan sejahtera.

Hal itu berbanding terbalik dengan situasi yang terjadi pada sejarah bangsa Indonesia di masa penjajahan Belanda. Bangsa Indonesia mencapai puncak kejayaan rasa nasionalisme pada masa tersebut. Dimana pejuang-pejuang terdahulu kita bersatu dari sabang sampai merauke untuk membebaskan diri dari tirani. Yang mana itu bisa terwujud jika adanya rasa nasionalisme yang tinggi di masyarakat Indonesia. Dan telah terbukti kita bisa memproklamasikan kemerdekaan

Republik Indonesia dengan semangat juang yang tinggi. Tapi bagaimana dengan saat ini? Hal tersebut pun berpengaruh pada ketahanan nasional bangsa ini. Dapat kita lihat aksi bom-bom di Negara Indonesia ini seakan menjawab bahwa rendah sekali rasa nasionalisme kita hingga kita bisa-bisanya merusak bangsa dan Negara kita sendiri.

Upaya pembinaan rasa nasionalisme pada masyarakat multikultural oleh pendidikan kewarganegaraan tampaknya merupakan suatu yang memang tidak bisa dipungkiri lagi. Karena pada hakekatnya pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam rangka mempersiapkan peserta didik menjadi warganegara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu dalam esai ini akan diuraikan tentang peranan pendidikan kewarganegaraan dalam pembinaan rasa nasionalisme pada masyarakat multikultural.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Sikap Nasionalisme Pada Masyarakat Multikultural**

Nasionalisme adalah suatu gerakan sosial, atau aliran rohaniah yang

mempersatukan rakyat ke dalam “*state*” yang membangkitkan masa ke dalam keadaan politik dan sosial yang aktif. Nasionalisme dipandang sebagai landasan ideal dari setiap negara. Nasionalisme sebagai manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita yang merupakan ilham yang mendorong dan merangsang suatu bangsa.

Selain itu, nasionalisme juga disebutkan sebagai prinsip, rasa dan usaha yang patriotik serta dengan segala daya siap pula untuk mempertahankannya. Sedangkan Semangat nasionalisme diartikan sebagai suasana bathin yang melekat dalam diri setiap individu sebagai pribadi maupun sebagian bagian dari bangsa dan negara, yang diimplementasikan dalam bentuk kesadaran dan perilaku yang cinta tanah air, kerja keras untuk membangun, membina dan memelihara kehidupan yang harmonis dalam rangka memupuk dan memelihara persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban harta, benda bahkan raga dan jiwa dalam membela bangsa dan negara. (Abubakar, 2008).

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa adalah sarana untuk membangkitkan semangat nasionalisme, yang dapat dilakukan dengan senantiasa memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan bernegara dalam kehidupan bermasyarakat. Kehendak bangsa untuk bersatu dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia merupakan sarat utama dalam mewujudkan nasionalisme nasional. Dengan demikian, tidak pada tempatnya untuk mempersoalkan perbedaan suku, agama, ras, budaya dan golongan. Kehendak untuk bersatu sebagai suatu bangsa memiliki konsekuensi siap mengorbankan kepentingan pribadi demi menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Tanpa adanya pengorbanan, mustahil persatuan dan kesatuan dapat terwujud. Malah sebaliknya akan dapat menimbulkan perpecahan. Inilah yang telah dibuktikan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Ada empat macam cita-cita nasionalisme, yaitu: *Pertama*, perjuangan untuk mewujudkan persatuan nasional yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial,

keagamaan, kebudayaan dan persekutuan serta adanya solidaritas. *Kedua*, perjuangan untuk mewujudkan kebebasan nasional yang meliputi kebebasan dari kekuatan-kekuatan intern yang tidak bersifat nasional atau yang hendak menyampingkan bangsa dan negara. *Ketiga*, perjuangan untuk mewujudkan kesendirian, perbedaan, individualitas, keaslian dan keistimewaan. *Keempat*, perjuangan untuk mewujudkan perbedaan di antara bangsa-bangsa yang meliputi perjuangan untuk memperoleh kehormatan, kewibawaan, gensi dan pengaruh (Isjwara. F, 1989: 130 dalam Anggraeni. L, 2009).

Konsep nasionalisme Indonesia pada perkembangannya memiliki corak tersendiri yang berbeda dengan nasionalisme barat. Nasionalisme yang perlu dibangun dalam masyarakat Indonesia yang bersifat multikultural adalah yang berdasarkan pada Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nasionalisme Indonesia bukan kebencian terhadap bangsa lain, melainkan cinta pada bangsa sendiri. Nasionalisme Indonesia memiliki sifat sebagai berikut: *bhineka tunggal ika, etis, universal, terbuka secara kultural dan religius, dan berdasarkan pada kepercayaan diri*. (Suseno, F.M, 1995 dalam Mahpudz, A, 2006: 278).

Sekaitan dengan penjelasan di atas, penulis meranggapan bahwa nasionalisme pada prinsipnya selalu ada dalam kehidupan masyarakat sebagai satu kesatuan yang disebut dengan bangsa yang didasari oleh adanya persamaan-persamaan, oleh karenanya harus selalu dikembangkan dan dipupuk kedalam diri pribadi setiap individu dari sejak kecil, baik itu di lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah.

## **B. Pendidikan Kewarganegaraan dan Masyarakat Multikultural**

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan kewarganegaraan merupakan nama mata

pelajaran wajib untuk kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan mata kuliah wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi (Pasal 37). Selanjutnya, pada Pasal 37 bagian Penjelasan dari Undang-Undang tersebut bahwa “Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Ketentuan ini lebih jelas dan diperkuat lagi oleh SK Dirjen Dikti No. 43 tahun 2006 pada pasal 3 tentang kompetensi dasar ayat 2b, menyebutkan tentang kompetensi mahasiswa dengan menempuh Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah: “Menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis dan berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.” Dengan adanya ketentuan UU dan SK Dirjen Dikti tersebut maka kedudukan pendidikan kewarganegaraan sebagai basis pengembangan masyarakat multikultural dalam sistem pendidikan di Indonesia semakin jelas dan mantap.

Terkait dengan masyarakat multikultural, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam rangka mempersiapkan peserta didik menjadi warganegara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan multikultural di Indonesia, yaitu “membina pribadi-pribadi bangsa Indonesia yang mempunyai kebudayaan sukunya masing-masing, memelihara dan mengembangkannya, serta sekaligus membangun bangsa Indonesia dengan kebudayaan Indonesia sebagaimana yang diamanatkan di dalam UUD 1945”. (Tilaar, 2004:192 dalam Budimansyah. D dan Suryadi. K, 2008: 31).

Pengembangan warganegara multikultural mensyaratkan terpenuhinya kompetensi kewarganegaraan yang bercirikan multikultural. Kompetensi kewarganegaraan multikulturalisme adalah seperangkat pengetahuan, nilai, dan sikap, serta keterampilan siswa yang mendukung menjadi

warganegara multikultural yang partisipatif dan bertanggungjawab dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Kompetensi kewarganegaraan multikultural yang dimaksud yaitu: 1) *Civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warganegara; 2) *Civic skill* (keterampilan kewarganegaraan), adalah kecakapan intelektual dan partisipatoris warganegara yang relevan; dan 3) *Civic disposition* (watak kewarganegaraan) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional (Bronson, 1998).

Ketiga kompetensi kewarganegaraan di atas, harus berjalan dengan terus menerus sebagai modal sosial (*sosial capital*) bangsa. Kompetensi kewarganegaraan ini juga berimplikasi pada perlunya interaksi yang bermakna antar anggota kelompok masyarakat yang berbeda.

Mengimplementasikan ketiga kompetensi ini dapat didasarkan pada empat dimensi kewarganegaraan sebagaimana dikemukakan Cogan (1998), yaitu *the personal, social, spatial, dan temporal dimension*. Dimensi pribadi dari kewarganegaraan multidimensi membutuhkan pengembangan satu kapasitas pribadi dan komitmen untuk etika warganegara yang dikarakteristikan oleh kebiasaan pikiran, perasaan dan tindakan secara individu dan sosial. Sebagai warga negara, setiap individu harus meningkatkan: (a) kapasitas untuk berpikir secara kritis dan sistematis; (b) pemahaman dan kepekaan terhadap masalah-masalah perbedaan-perbedaan budaya; (c) pilihan terhadap pemecahan dan penyelesaian masalah yang bertanggung jawab, kooperatif dan tanpa kekerasan, dan (d) keinginan untuk melindungi lingkungan, membela hak asasi manusia, dan ikut serta dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan perkembangan mutakhir, dimana tujuan PKn adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dari warga negara dalam kehidupan politik dan masyarakat baik pada tingkat lokal maupun nasional, maka partisipasi semacam itu

memerlukan penguasaan sejumlah kompetensi kewarganegaraan. Sejumlah kompetensi yang diperlukan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Zuriah (2010) adalah: (1) penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu, (2) pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris, (3) pengembangan karakter dan sikap mental tertentu, dan (4) komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip dasar demokrasi konstitusional.

### C. PKn Sebagai Wahana Pendidikan Multikultural

Pengembangan masyarakat multikultural yang demokratis menjadi kebutuhan bagi bangsa Indonesia yang ditandai oleh kemajemukan (pluralitas) dan keanekaragaman (heterogenitas), karena multikultural pada dasarnya menekankan pada kesederajatan kebudayaan yang ada dalam sebuah masyarakat, dan mengusung semangat untuk hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*) dalam perbedaan kultur yang ada, baik secara individual maupun secara kelompok dalam sebuah masyarakat. Masyarakat multikultural yang demokratis di Indonesia yang sehat tidak bisa dibangun secara *taken for granted* atau *trial and error*, sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, programatis, *integrated* dan berkesinambungan. Salah satu strategi dan wadahnya adalah melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan yang dimaksudkan di sini adalah Pendidikan Kewarganegaraan dalam arti luas (*citizenship education*) yang memiliki perspektif kewarganegaraan dunia abad ke-21 yang terkenal dengan sebutan kewarganegaraan multidimensi yang salah satu cirinya memiliki karakteristik multikultural (Cogan, 1998:116).

Menurut Winataputra (2008: 30), Indonesia dikonsepsikan dan dibangun sebagai *multicultural nation-state* dalam konteks negara kebangsaan Indonesia modern, bukan sebagai *monocultural nation state*. Hal itu dapat dicermati dari dinamika praksis kehidupan bernegara Indonesia sejak Proklamasi Kemerde-kaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai saat ini dengan mengacu

pada konstitusi yang pernah dan sedang berlaku, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950, serta praksis kehidupan bernegara dan pada setiap jamannya itu.

Lebih lanjut menurut Winataputra (2008:31) pendidikan kewarganegaraan untuk Indonesia, secara filosofik dan substantif-pedagogis *andragogis*, merupakan pendidikan untuk memfasilitasi perkembangan pribadi peserta didik agar menjadi warga negara Indonesia yang religius, berkeadaban, berjiwa persatuan Indonesia, demokratis dan bertanggung jawab, dan berkeadilan, serta mampu hidup secara harmonis dalam konteks multikulturalisme-Bhinneka Tunggal Ika. Dalam konteks yang demikian, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan masyarakat multikultural.

Namun demikian kenyataan praksis di lapangan Pendidikan Kewarganegaraan di berbagai jenjang pendidikan merupakan ujung tombak dan bagian dari proses membangun cara hidup multikultural untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan penghargaan akan keragaman justru belum menggembirakan, mulai kehilangan dimensi multikulturalnya, bahkan kehilangan aktualisasinya karena terjebak pada penguasaan pengetahuan (*knowledge*) belaka dengan membiarkan aspek afeksi (*attitude*) pendidikannya. Pembelajaran PKn umumnya dilakukan secara parsial dan tidak mengakomodir nilai-nilai multikulturalisme dan kearifan lokal masyarakat setempat. Padahal seharusnya PKn sebagai wahana pendidikan multikultural dapat mengembangkannya secara lebih sistematis dan komprehensif.

Salah satu bidang kajian yang dapat menjadi wahana bagi pendidikan multikultural adalah pendidikan kewarganegaraan. Studi yang dilakukan oleh Arif (2008) telah menemukan bahwa peran pendidikan kewarganegaraan sebagai program kurikuler, program sosio cultural, maupun program akademik dapat menjadi wahana pendidikan multikultural. Selain itu, Mahfud (2010) menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara majemuk, baik dalam segi agama, suku

bangsa, golongan, maupun budaya lokal, perlu menyusun konsep pendidikan multikultural sehingga menjadi pegangan untuk memperkuat identitas Nasional. Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang telah diajarkan di sekolah dasar hingga perguruan tinggi, sebaiknya disempurnakan dengan memasukkan pendidikan multikultural, seperti budaya lokal antar daerah kedalamnya, agar generasi muda bangsa sebagai bangsa Indonesia.

PKn sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan disemua jenjang dan jenis sekolah secara pragmatik memiliki *psyco-pedagogis*, yaitu membina warga Negara yang demokratis dalam ruang lingkup pendidikan di lembaga pendidikan fomal maupun formal, Sapriya dan Winatapura (2010:1.2), menyatakan bahwa tugas PKn dengan paradigma barunya mengembangkan pendidikan demokrasi/multikultural mengembangkan tiga fungsi pokok, yakni mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelegence*), membina tanggungjawab warga negara (*civic responsibility*) dan mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*).

Kecerdasan warga negara yang dikembangkan untuk membentuk warga negara yang baik bukan hanya dalam dimensi rasional melainkan juga dalam dimensi spiritual, emosional dan sosial sehingga paradig baru PKn bercirikan multidimensional. Oleh karenanya, PKn dengan paradigma baru mengamanatkan, agar multikultural difahami secara cerdas dan berbudaya. Jadi, bukan multikultural yang diartikan dengan cara yang berbeda sehingga bisa memaksakan kehendak sendiri terhadap orang lain. Apabila multikultural diterjemahkan dengan cara destruktif, intimidatif dan tidak menggunakan akal sehat, maka akan terjadi anarkisme global sehingga menyalahi nilai-nilai multikultural yang ada dan bertentangan dengan tujuan PKn sebagaimana tercantum dalam standar Isi PKn (2006: 2) yang hendak mengembangkan kemampuan: 1) berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, 2) berpartisipasi secara aktif

dan bertanggungjawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi; 3) berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; 4) berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

#### **D. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Memupuk Sikap Nasionalisme pada Masyarakat Multikultural**

Keragaman ciri dan identitas kelompok-kelompok masyarakat atau masyarakat multikultural merupakan realitas yang tidak dapat dibantah didalam kehidupan bangsa. Selama ini hal tersebut cenderung menjadi potensi komplik antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan perubahan pemahaman bahwa keragaman ciri dan identitas tersebut merupakan potensi, modal bagi kekuatan dalam sebuah wadah persatuan bangsa Indonesia. Dalam rangka pemikiran tersebut, semakin dibutuhkan upaya membangun kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan pemahaman terhadap kebhinakaan dan multikultural yang dimiliki bangsa sebagai suatu potensi bagi integrasi bangsa bukan sebagai pemicu disintegrasi bangsa.

Dibutuhkan langkah dan upaya secara intensif membangun kesadaran dan saling menghargai antar warganegara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warganegara. Dibutuhkan tindakan dan perlakuan yang adil terhadap seluruh warganegara sehingga tumbuh suasana keterbukaan, dialog, solidaritas yang berbasis pada pemahaman adanya kebhinakaan.

Semakin penting untuk terus menumbuhkembangkan kesadaran nasionalisme Indonesia dimasa kini dalam wujud pendidikan antisipatoris. Pendidikan yang tidak sekedar mentransformasi pengetahuan, tetapi juga memberikan pemahaman wawasan kebangsaan, wawasan kebhinekaan yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai suatu potensi yang dimiliki.

Pendidikan dalam konteks nilai-nilai kejuangan dan kepribadian bangsa dengan mendasarkan pada nilai-nilai fundamental yang dimiliki bangsa secara kontinu dan konsisten. Pendidikan yang diarahkan tidak hanya pembinaan kemampuan intelektual, tetapi perlu didukung oleh kemampuan untuk mengenali diri sendiri. Dalam pandangan Azyumardi Azra (dalam Asep Mahpudz, 2006: 282) pendidikan bertugas mengembangkan setidaknya lima bentuk kecerdasan, yakni (1) kecerdasan intelektual, (2) kecerdasan emosional, (3) kecerdasan praktikal, (4) kecerdasan sosial, dan (5) kecerdasan spiritual dan moral.

Terkait dengan penjelasan di atas, pendidikan yang memberikan kesadaran akan pentingnya integrasi bangsa dan sikap nasionalisme warganegara diperlukan. Karena itu peran pendidikan kewarganegaraan (PKn) menjadi penting dalam mempertahankan integrasi bangsa dan mengembangkan nasionalisme warganegara di tengah realitas masyarakat Indonesia yang majemuk dan heterogen. Sebagaimana yang telah diuraikan pada poin B tulisan ini bahwa "Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air". Selain sebagai pembinaan sikap nasionalisme, PKn juga berperan penting dalam pendidikan multikultural untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warganegara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia.

PKn memegang peranan yang strategis dalam memupuk jiwa nasionalisme dalam masyarakat multikultural, bukan hanya untuk masa sekarang, tetapi secara *futureologist* bagi kelanjutan pembangunan bangsa. Pembelajaran PKn pada hakekatnya merupakan unit geopolitik yang mewujudkan proses-proses kehidupan bangsa dalam totalitasnya terutama untuk integritas bangsa. Adapun fungsi PKn tersebut terutama untuk menerangkan eksistensi ataupun sosiogenesis negara-nation kita.

## PENUTUP

Pengembangan rasa nasionalisme dalam masyarakat multikultural harus dibangun dari idealisme yang melekat dalam diri seseorang, maka selama seseorang itu tidak memiliki idealisme sebagai bangsa yang bersatu dalam realitas khinekaannya, maka kesadaran akan nasionalisme itu masih perlu terus dibentuk dan dikembangkan dalam diri setiap individu.

Menumbuhkembangkan sikap integrasi bangsa dan sikap nasionalisme warganegara melalui pendidikan kewarganegaraan senantiasa akan menyentuh hakekat dari kehidupan manusia sendiri, yakni menyangkut kepentingan yang saling berbeda secara rasional. Proses untuk membentuk kehidupan bersama sebagai suatu bangsa yang berdaulat memerlukan kesediaan untuk saling bertoleransi, saling memberi dan menerima.

Kondisi bangsa Indonesia yang multikultural merupakan potensi yang mampu memberikan peluang bagi terbentuknya dan berkembangnya integrasi bangsa dan sikap nasionalisme warganegara. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa langkah yang setidaknya dapat dilakukan untuk memperkokoh rasa nasionalisme tersebut, yakni: *pertama*, meningkatkan pemahaman akan berbagai aspek budaya yang dimiliki bangsa melalui pendidikan yang tidak hanya mentransformasi pengetahuan tetapi juga memberikan pemahaman wawasan kebangsaan, wawasan kebhinekaan yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai suatu potensi yang dimiliki.

Pendidikan dalam konteks nilai-nilai kejuangan dan kepribadian bangsa dengan mendasarkan pada nilai-nilai fundamental yang dimiliki bangsa secara kontinu dan konsisten. Pendidikan yang diarahkan tidak hanya pembinaan kemampuan intelektual, tetapi perlu didukung oleh kemampuan untuk mengenali diri sendiri. Dalam hal ini pendidikan kewarganegaraanlah yang memiliki peran strategis. *Kedua*, mengintensifkan kontak lintas budaya melalui proses pendidikan yang saling menghargai, pendidikan damai dan pendidikan demokrasi sejak dini. Dalam konteks ini pendidikan kewarganegaraan dalam pembelajaran perlu

ditingkatkan baik di SD, SMP, SMA dan di perguruan tinggi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abubkar, Mustafa. (2008). *Membangun Semangat Nasionalisme dengan Bingkai Kearifan Lokal Rakyat Aceh-Tinjauan Ketahanan Pangan*. (online). Tersedia: [http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=2797&Itemid=222](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=2797&Itemid=222). (31 Mei 2011)
- Arif, Baehaqi. D. (2008). Kompetensi Kewarganegaraan untuk Pengembangan Masyarakat Multikultural Indonesia. *Acta Civicus, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. "Volume 2, Nomor 1, Oktober 2008". Hal 102-103. Bandung: Pasca Sarjana UPI
- Agraeni, Leni. (2009). Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultural dalam Memupuk Nasionalisme. *Acta Civicus, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. "Volume 3, Nomor 1, Oktober 2009". Hal 95-96. Bandung: Pasca Sarjana UPI
- Budimansyah. D dan Suryadi. K. (2008). *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: PSPKn SPS Universitas Pendidikan Indonesia
- Branson, M.S. (1998). *The Role of Civic Education*. Calabasas: CCE.
- Cogan, J.J. dan Derricot, R. (1998). *Citizenship for the 21<sup>st</sup> Century: An International Perspective on Education*. London: Kogan Page.
- Mahpudz, Asep. (2006). Wawasan Nusantara: Landasan Pembinaan Nasionalisme Indonesia dan Pendidikan Kewarganegaraan, Dalam *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Budimansyah, D dan Syam, S. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) FPIPS-UPI.
- Sapriya dan Winataputra (2010), Materi dan Pembelajaran PKn SD, Jakarta, UT.
- Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003. (online). Tersedia: [www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf](http://www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf). (31 Mei 2011).
- Winataputra. U.S. (2008). Multikulturalisme – Bhinneka Tunggal Ika dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pemba-ngunan Karakter Bangsa Indonesia Dalam Dialog Multikultural. Bandung: Sekolah Pascasarjana UPI.
- Zuriah, Nurul. (2010). Model Pengembangan PKn Multikultural Berbasis Kearifan Lokal dalam fenomena Sosial di Perguruan Tinggi, Laporan Penelitian Hibah Doktor. DP2M - Dikti – Jakarta: Tahun 2010.